



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP



DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung D lantai 3
Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong 75511 Telp(0541) 6669034, Fax (0541) 6667139
Website: <http://www.disbudpar.kutaikartanegarakab.go.id> – visitingkutaikartanegara.com

Email : disparkukar@gmail.com

T E N G G A R O N G

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pariwisata Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali peningkatan kinerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Pariwisata kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tenggarong, 15 Januari 2024

Kepala Dinas Pariwisata
Kab. Kutai Kartanegara,


H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19700407 199803 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	9
1.3 Tupoksi	10
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis.....	10
1.5 Uraian Singkat Organisasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Perencanaan Strategis	16
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja	23
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023	23
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	98
4.2 Perbaikan Kedepan	23
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja (PK) 2023	
Lampiran 2 Matriks Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026	
Lampiran 3 Rencana Aksi Tahun 2023	
Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Tahun 2023	
Lampiran Tabel	

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

- 1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Tugas Pokok Dinas Pariwisata adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pariwisata.
- 3) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan di Bidang Pariwisata;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pariwisata;

- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pariwisata;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Pariwisata;
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun tata kerja Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas:

- a. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan;
- b. merumuskan kebijakan teknis Dinas;
- c. merumuskan rencana program kerja Dinas;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan program Dinas;
- e. merumuskan kebijakan administrasi Dinas;
- f. merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Dinas;
- g. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur urusan Kepala Dinas; dan
- j. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris:

- a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Dinas yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan

transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKJLP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
- h. mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Dinas;
- k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Dinas; dan
- l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan:

- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

- b. menyusun rencana kegiatan urusan Umum dan ketatalaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;
- e. merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
- f. melaksanakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum dan Ketatalaksanaan;
- h. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum dan Ketatalaksanaan; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Kepegawaian:

- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. merencanakan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;
- e. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur urusan Kepegawaian;
- f. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kepegawaian;
- g. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian; dan
- h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub. Koordinator Penyusunan Program Dan Keuangan (Perencana):

- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD Dinas melaporkan ke kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
- d. merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), LKPJ dan LKPD;
- e. menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM);
- f. menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;

- g. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- h. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan; dan
- j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata:

- a. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pembinaan Industri Pariwisata meliputi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata, Pembinaan Usaha Sarana Pariwisata, Kemitraan Industri Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata sesuai Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. mengkoordinasikan stakeholder usaha pariwisata dan asosiasi kepariwisataan;
- e. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Pembinaan Industri Pariwisata;
- f. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pembinaan Industri Pariwisata;
- g. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pembinaan Industri Pariwisata; dan
- h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adyatama Kepariwisatahan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Usaha Jasa Pariwisata:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

- b. menyusun rencana kegiatan urusan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan pelaku usaha Jasa Pariwisata;
- d. merencanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa pariwisata;
- e. merencanakan inventarisasi usaha jasa pariwisata;
- f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata;
- g. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata;
- h. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata; dan
- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adyatama Kepariwisataa Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Pembinaan Usaha Sarana Pariwisata:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Pembinaan Usaha Sarana Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan inventarisasi usaha sarana pariwisata;
- d. merencanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan pelaku usaha Sarana Pariwisata;
- e. merencanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha sarana pariwisata;
- f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Pembinaan Usaha Sarana Pariwisata;
- g. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pembinaan Usaha Sarana Pariwisata;
- h. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pembinaan Usaha Sarana Pariwisata; dan

- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Kemitraan Industri Pariwisata:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Kemitraan Industri Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan pembinaan forum pelaku industri pariwisata tingkat kabupaten;
- d. merencanakan kegiatan kerja sama antar pelaku usaha pariwisata dan asosiasi usaha pariwisata;
- e. merencanakan kegiatan kerja sama lintas sektor penguatan jejaring usaha pariwisata, sinergi antar usaha mikro, kecil, menengah, dan makro pariwisata, produk dan kemudahan pelayanan kepariwisataan dan kualitas usaha pariwisata;
- f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Kemitraan Industri Pariwisata;
- g. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kemitraan Industri Pariwisata;
- h. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kemitraan Industri Pariwisata; dan
- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif:

- a. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya, Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain Dan Iptek, Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas; mengkoordinasikan penyiapan

- bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah;
- c. mengkoordinasikan pembinaan yang berkaitan sektor kegiatan usaha ekonomi kreatif;
 - d. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kerja dan Standar Operasional Prosedur urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - e. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - f. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - g. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Festival seni budaya;
- d. mengembangkan aktivitas seni kreatif berbasis seni budaya daerah;
- e. merencanakan dan menyusun pedoman pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya;
- f. mengembangkan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif berbasis seni budaya;
- g. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
- h. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya; dan
- j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengembangkan aktivitas kreatif berbasis media, desain dan Iptek;
- d. merencanakan dan menyusun pedoman pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan Iptek;
- e. mengembangkan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan Iptek;
- f. mengembangkan peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek;
- g. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
- h. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain Dan Iptek;
- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek; dan
- j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan pembinaan forum pelaku ekonomi kreatif tingkat Kabupaten;
- d. merencanakan kegiatan pengembangan pasar ekonomi kreatif daerah;
- e. mengembangkan kerjasama pelaku ekonomi kreatif dengan pelaku industri pariwisata;

- f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- h. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata:

- a. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pemasaran Pariwisata meliputi Promosi Pariwisata, Data dan Informasi Pariwisata, Analisis Pasar Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan penyusunan data statistik kepariwisataan dan Neraca Satelit Pariwisata Daerah;
- d. mengkoordinasi penyusunan pemetaan dan pengembangan pasar Pariwisata Kabupaten;
- e. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Pemasaran Pariwisata;
- f. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemasaran Pariwisata;
- g. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemasaran Pariwisata; dan
- h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Promosi Pariwisata:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Promosi Pariwisata, daya tarik wisata di dalam dan luar negeri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merancang publikasi daya tarik wisata secara regional, nasional dan internasional;
- d. merencanakan kegiatan inovasi pengembangan promosi pariwisata daerah;
- e. membuat konsep fasilitasi Komunitas wisata dan jurnalis sebagai upaya promosi daya tarik wisata daerah;
- f. menyusun dan merancang bahan-bahan promosi pariwisata daerah dan wisata MICE;
- g. mengembangkan komunikasi pemasaran dengan jejaring untuk promosi daya tarik wisata daerah;
- h. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Promosi Pariwisata;
- i. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Promosi Pariwisata;
- j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Promosi Pariwisata; dan
- k. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Data dan Informasi Pariwisata:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Data dan Informasi Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyusun bahan pelayanan informasi pariwisata melalui sistem teknologi informasi, media cetak dan elektronik;
- d. merencanakan kegiatan dan menyusun bahan pelaksanaan pengembangan jaringan informasi pariwisata;

- e. mengembangkan pemanfaatan pusat informasi pariwisata kabupaten (Tourist Information Center);
- f. merancang dan mengembangkan penyajian dan pembaruan informasi pariwisata secara cepat dan tepat secara online maupun melalui bahan-bahan informasi lainnya;
- g. menentukan unit Informasi Pariwisata Daerah pada Daya Tarik Wisata dan lokasi strategis daerah;
- h. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Data dan Informasi Pariwisata;
- i. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Data dan Informasi Pariwisata;
- j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Data dan Informasi Pariwisata; dan
- k. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Analisis Pasar Pariwisata:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Analisis Pasar Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan dan menyusun bahan Analisis Pasar Pariwisata;
- d. merencanakan kegiatan analisis pemenuhan kebutuhan pasar utama dan pasar sekunder wisatawan di tingkat Kabupaten;
- e. merencanakan kegiatan analisis tentang preferensi dan pola perjalanan wisata baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara;
- f. merencanakan kegiatan survey dan kajian teknis tentang persepsi dan kepuasan wisatawan;
- g. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Analisis Pasar Pariwisata;
- h. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Analisis Pasar Pariwisata;

- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Analisis Pasar Pariwisata; dan
- j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata:

- a. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pengembangan Destinasi Pariwisata meliputi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pemberdayaan Masyarakat Wisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat wisata;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan wisata pada daya tarik wisata daerah;
- e. mengkoordinasikan penyusunan bahan bagi Tim Terpadu Pengembangan Pariwisata Daerah;
- f. mengkoordinasikan bahan pengendalian pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (RIPPARDA);
- g. mengkoordinasikan mekanisme tata kelola destinasi pariwisata;
- h. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- i. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- j. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- k. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Pengembangan Daya Tarik Wisata:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana daya tarik wisata daerah;
- d. merencanakan dan memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru daerah;
- e. menyiapkan bahan-bahan koordinasi bagi Tim Terpadu Pengembangan Pariwisata Daerah;
- f. menyusun pedoman operasional dan mekanisme tata kelola kawasan destinasi pariwisata;
- g. menyusun bahan pengendalian pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten berdasarkan (RIPPARDA);
- h. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- i. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
- k. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Pengelolaan Daya Tarik Wisata:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan stimulant/bantuan perkuatan terhadap pemanfaatan daya tarik wisata Kabupaten;

- d. membuat konsep Kerjasama Pemanfaatan Pengelolaan wahana daya tarik wisata Kabupaten dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya;
- e. membuat konsep kerjasama penyediaan tenaga ahli terhadap pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas daya tarik wisata yang berada di bawah kewenangan kabupaten;
- f. menyusun Laporan Jumlah Pengunjung pada daya tarik wisata Kabupaten setiap bulan, triwulan semester dan tahunan;
- g. menganalisa dan menjaga serta mengawasi aset-aset pemerintah yang ada di daya tarik wisata yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten dan kenyamanan pengunjung pada daya tarik wisata yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- h. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
- i. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
- j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pengelolaan Daya Tarik Wisata; dan
- k. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Wisata:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Wisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyusun dan melaksanakan program peningkatan kapasitas SDM masyarakat wisata;
- d. merencanakan peran serta masyarakat dalam kegiatan sadar wisata;
- e. menyusun inventarisasi kelompok-kelompok masyarakat wisata;
- f. merencanakan pembinaan kepada masyarakat wisata;
- g. merencanakan aksi-aksi kampanye sadar wisata dan sapta pesona;
- h. menyusun panduan dan pedoman operasional sadar wisata dan sapta pesona;

- i. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur urusan Pemberdayaan Masyarakat Wisata;
- j. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat Wisata;
- k. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Wisata; dan
- l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Tahun 2023

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Trend Kunjungan Wisatawan menurun	Masih banyaknya event/festival yang belum memenuhi standar	Belum optimalnya pelatihan dan pendampingan penyelenggaraan event/ festival	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Kurangnya hari pelaksanaan festival				Bidang Pemasaran Pariwisata
		konten dan rangkaian kegiatan yang belum memenuhi standar				
		Daya dukung amenities dan aksesibilitas belum optimal disekitar event/festival				
		Kurangnya daya beli masyarakat yang berdampak pada kemampuan untuk melakukan kunjungan wisata				
	Kurangnya Kualitas Daya Tarik wisata	Penyebaran fasilitas penunjang (konsumsi, akomodasi) belum merata di DTW dan desa wisata				
		Aksesibilitas ke DTW masih sulit dan kurang memadai				

Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana (amenitas), aksesibilitas menuju ke DTW

Masih minimnya investasi sektor pariwisata	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sadar wisata
	Belum adanya sekolah vokasi pariwisata
	Kurangnya jumlah SDM pariwisata
	Kurangnya minat generasi muda pada sector pariwisata
	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aktifitas kepariwisataan
	Masih kurang aktifnya POKDARWIS dalam mensosialisasikan dan menerapkan Sapta Pesona
	Jumlah POKDARWIS tidak sebanding dengan potensi wisata yang ada
Belum optimalnya pemasaran pariwisata	Masih kurangnya promosi pariwisata diberbagai media promosi (offline dan Online)
	Masih kurangnya penyediaan data informasi pariwisata
Perubahan dalam perilaku konsumen pasca wabah Covid 19	Pembatasan kegiatan masyarakat lokal dan kebijakan menutup DTW yang dikelola pemerintah

Masih kurangnya event kreatif

Kurangnya pemanfaatan dan Fasilitasi HAKI	Masih kurangnya ruang kreasi bagi pelaku kreatif di kecamatan	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif	Persentase pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Kurangnya produk khas daerah			Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan hak cipta			
	Kurang terfasilitasinya pelaku dan produk kreatif daerah			
Rendahnya Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Belum terwadahi pelaksanaan event kreatif			
	Keengganan pelaku menampilkan hasil karyanya			
	Ekosistem ekonomi kreatif "ABCGM" (academition, busines, community, government, Media) belum optimal.			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Tahun 2023

1.5 Uraian Singkat Organisasi

1. Jenis Pelayanan

Ada beberapa jenis pelayanan yang diampu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang sebagai berikut:

Tabel

Jenis Pelayanan Dinas Pariwisata

No.	Sekretariat/Bidang	Sasaran	Jenis
1.	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none">– ASN Dinas– Instansi/lembaga terkait– Mahasiswa/ Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">– Pelayanan penyelenggaraan urusan umum;– Pelayanan pelaksanaan urusan kepegawaian;– Pelayanan pelaksanaan urusan keuangan Dinas Pariwisata;– Pelayanan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;– Pelayanan pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pariwisata– Pelayanan data/evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja– Sekretariat Pelayanan aduan masyarakat– Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian
2.	Bidang Pengembangan Pemasaran pariwisata	<ul style="list-style-type: none">– Pramuwisata– Masyarakat, instansi dan perusahaan– Pelajar dan mahasiswa– Biro Perjalanan (travel agent)– Wisatawan	<ul style="list-style-type: none">– Perumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata;– Penyusunan analisa pasar kepariwisataan;– Pengelolaan dokumentasi dan informasi pariwisata;– Pengembangan promosi pariwisata,
3.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">– Obyek Destinasi Tujuan Wisata– Desa Wisata– Pokdarwis	<ul style="list-style-type: none">– Perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata;– Pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata;– Pengembangan atraksi wisata;

4.	Bidang Pembinaan Industri Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> – Pengurus Desa Wisata – Pengurus Forkom Desa Wisata – Usaha Pondok Wisata, Rekreasi dan hiburan umum, hotel, restoran, dan rumah makan – Usaha wisata Biro perjalanan wisata/agen perjalanan wisata – Pedagang makanan dan cinderamata – Saka Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> – Perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia dan usaha pariwisata; – Pengembangan sumber daya manusia dan usaha pariwisata; – Pembinaan sumber daya manusia pariwisata dan usaha pariwisata; – Pembinaan kelembagaan dan partisipasi kepariwisataan lokal, nasional maupun internasional
5.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kelompok Ekonomi Kreatif	Pengembangan ekonomi kreatif

2. Kondisi Umum Pelayanan

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki daya tarik pariwisata yang terpadu antara panorama alam yang kuat dengan seni budaya. Terdapat pula wisata alam, wisata pedesaan dan wisata buatan. Dari arah kebijakan yang ditetapkan dan dari pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pariwisata, Sedangkan kondisi yang diinginkan dan proyeksi secara kuantitatif sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

- Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 100 %
- Predikat nilai SAKIP BB 80,30
- Jumlah kunjungan wisatawan 1.531.974 orang
- Lama tinggal wisatawan nusantara 2,02 hari
- Lama tinggal wisatawan mancanegara 2,04 hari
- Desa wisata kategori mandiri 12 desa

3. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pada lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Pariwisata

Obyek Wisata, Hotel, Restoran dan Biro Perjalanan

No.	Jenis	Jumlah Pada Tahun	
		2022	2023
1	Desa Wisata	10	10
2	Hotel Berbintang	4	4
3	Hotel Non Bintang	109	109
4	Pondok Wisata		
5	Restoran	301	301
6	Rumah Makan	-	-
7	Biro Perjalanan Wisata	14	14
8	Cabang Biro Perjalanan Wisata		
9	Agen Perjalanan Wisata	30	30
10	Jasa makan dan minum	77	75
11	Jasa akomodasi Hotel		
12	Event Organiser		
13	Jasa Impresariat		
14	Jasa Boga	29	29
15	Jasa Management Hotel		
16	Karaoke	14	14

Sumber data : Sie UJP Bidang Pemasaran Pariwisata, 2023

2. Fasilitas di Obyek Wisata

a. Pulau Kumala :

No.	Jenis	Jumlah Pada Tahun	
		2022	2023
1	Kios	1	1
2	TIC	1	1
3	Mushollah	1	1
4	Tempat Pemungutan Retribusi	1	1
5	Toilet	2	2
6	Panggung Terbuka	1	1
7	Arena Permainan Anak	1	1
8	Becak Air		
9	Tempat Parkir	1	1

Sumber data :

b. Planetarium Jagad Raya :

No.	Jenis	Jumlah Pada Tahun	
		2022	2023
1	Kios	1	1
2	TIC	1	1
3	Mushollah	1	1
4	Tempat Pemungutan Retribusi	1	1
5	Toilet	2	2
6	Panggung Terbuka		
7	Arena Permainan Anak	2	2
8	Becak Air		
9	Tempat Parkir	1	1

Sumber data :

c. Waduk Panji Sukarame:

No.	Jenis	Jumlah Pada Tahun	
		2022	2023
1	Kios	1	1
2	TIC	1	1
3	Mushollah	1	1
4	Tempat Pemungutan Retribusi	1	1
5	Toilet	2	2
6	Panggung Terbuka		
7	Arena Permainan Anak	2	2
8	Becak Air		
9	Tempat Parkir	1	1

d. Pemancingan Loa Kulu:

No.	Jenis	Jumlah Pada Tahun	
		2022	2023
1	Kios		
2	TIC		
3	Mushollah	1	1
4	Tempat Pemungutan Retribusi	1	1
5	Toilet	1	1
6	Panggung Terbuka		
7	Arena Permainan Anak		
8	Becak Air		
9	Tempat Parkir	1	1

3. Perkembangan Kunjungan Wisatawan

Tabel
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek dan Daya Tarik Wisata
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 – 2023

Tahun	Wisnus	Wisman	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2017	1.790.693	4.552	1.795.245	93,78
2018	1.800.756	4.804	1.805.560	100,57
2019	1.596.277	4.589	1.600.866	88,66
2020	692.689	557	693.246	43,30
2021	617.018	46	617.064	89,01
2022	1.041.254	632	1.041.886	168,76
2023	1.530.444	1.530	1.531.974	147,0

Tabel di atas memperlihatkan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2017 – 2023.

Secara terpisah pertumbuhan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara dapat dicermati pada 2 (dua) tabel berikut ini :

Tabel
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 – 2023

Tahun	Wisatawan Nusantara	Pertumbuhan (%)
2017	1.790.693	93,80
2018	1.800.756	100,56
2019	1.596.277	88,64
2020	692.689	43,39
2021	617.018	89,07
2022	1.041.254	168,76
2023	1.530.444	147,13

Tabel
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan
Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 - 2023

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Pertumbuhan (%)
2017	4.552	86,67
2018	4.804	105,54
2019	4.589	95,52
2020	557	12,14
2021	46	8,26
2022	632	13,73
2023	1.530	242,0

Kedua tabel diatas memperlihatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Kutai Kartanegara periode Tahun 2016 – 2023.

Tabel
Okupansi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No.	Uraian	2023
1.	Jumlah kamar yang terjual	57.921
2.	Jumlah kamar yang tersedia	91.954
	Capaian	62,98

4. Perkembangan PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 – 2023

No.	Uraian	Pada Tahun	
		2022	2023
1	Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.065.374.000,00	1.340.767.000,00
2	Lain-Lain PAD		
3	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	18.840.000,00	91.988.000,00
	Jumlah	1.084.214.000,00	1.432.755.000,00

Sumber data : BPKAD dan Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara ,2023

5. Perkembangan Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2023

Uraian	Pada Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Belanja Tidak Langsung/Belanja Operasi	14.373.857.219,31	29.226.402.118,00	41.510.661.574,00	
Belanja Langsung/Belanja Modal	31.141.307.137,12	2.945.019.095,00	3.123.214.895,00	
Jumlah	45.515.164.356,43	32.171.421.213,00	44.633.876.469,00	

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kondisi lingkungan internal Dinas Pariwisata dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif yang tersedia seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta organisasi pemerintah. Identifikasi ini dimaksudkan agar Dinas Pariwisata dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Tantangan dan peluang yang ada diantaranya adalah:

- a. Banyaknya pelaku pariwisata.
- b. Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan budaya dan pariwisata.
- c. Minat masyarakat terhadap pengembangan budaya dan improvisasi pariwisata.
- d. Keanekaragaman produk budaya dan pariwisata.
- e. Kemudahan mengakses informasi.
- f. Kemudahan aksesibilitas ke dan dari Kabupaten Kutai Kartanegara.
- g. Persaingan antar daerah tujuan wisata semakin tajam.
- h. Kemampuan menyeleksi nilai budaya masih rendah.
- i. Dukungan sektor lain terhadap pembangunan seni budaya dan pariwisata belum optimal.
- j. Image keamanan masih labil.

Untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut, Dinas Pariwisata diharapkan dapat responsive, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan visi dan misi. Pendekatan yang diambil melalui perencanaan partisipatif, optimalisasi

sumberdaya yang dimiliki, memantapkan kelembagaan serta koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan.

5. Permasalahan yang dihadapi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata menghadapi beberapa kendala di bidang pariwisata diantaranya:

- a) Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap kepedulian social.
- b) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang.
- c) Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing obyek dan daya tarik wisata masih kurang.
- d) Kualitas sumber daya manusia dan pelaku usaha pariwisata belum optimal.
- e) Pengembangan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal belum optimal.
- f) Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai, berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengemban Visi Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021** yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”*.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu *“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”*.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;

4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata adalah **Misi ke-2** yaitu ***Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;*** (kalimat misi dimaksud). Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dan Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Persentase Pertumbuhan pelaku ekraf

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pariwisata untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan industri pariwisata berbasis potensi destinasi dan festival pariwisata yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan Pemerintah Desa
2. Penguatan kemitraan antara pemerintah daerah dan komunitas kreatif, dalam penyelenggaraan pekan kreatifitas daerah

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Pariwisata Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	1. Peningkatan industri pariwisata berbasis potensi destinasi dan festival pariwisata yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan Pemerintah Desa 2. Penguatan kemitraan antara pemerintah daerah dan komunitas kreatif, dalam penyelenggaraan pekan kreatifitas daerah	1. Menyelenggarakan 100 Festival (dalam 5 tahun) untuk mendorong tingkat kunjungan wisata serta meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif dan industri pariwisata daerah (hotel, rumah makan, biro perjalanan wisata, souvenir dan homestay) 2. Memaksimalkan Penyelenggaraan Event Kreatif, 4 (empat) kali dalam setahun yang dilaksanakan di beberapa Kecamatan yang berbeda dengan Tema dan konten tertentu Serta memfasilitasi penyelenggaraan event dengan melibatkan insan komunitas kreatif yang bertugas untuk memunculkan ide-ide kreatif serta konten acara, dengan cara mengkurasi konten dan produk kreatif yang akan ditampilkan

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel
Keselarasn Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase DTW yang memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Persentase Okupansi	Program Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif	Pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Pertumbuhan pelaku ekraf	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.808.979	
Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	2	
Predikat Akuntabilitas kinerja Dispar	Nilai SAKIP	Nilai	72	
Menyelesaikan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di Tindak Lanjuti	Persen	100	
Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan barang Milik Daerah yang berada di Pengguna barang Milik Daerah	Persentase melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan barang Milik Daerah yang berada di Pengguna barang Milik Daerah	Persen	100	
Melaksanakan Pengelolaan pengadaan barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	
	Tingkat kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat tata kelola arsip perangkat daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	

Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	
Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	
Terealisasinya Output kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	
	Persentase realisasi keuangan	Persen	100	
Melaksanakan manajemen Esiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2	
Melaksanakan reuiu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reuiu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	
Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	
Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	
Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	Rp.2.590.944.400	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

1.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Pariwisata dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Pariwisata tahun 2023 sebesar 111,53 %. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	72	80,30	111,53	Sangat Tinggi
Meningkatnya kunjungan wisata di Kutai Kartanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.808.979	1.531.974	84,69	
Meningkatnya Aktifitas	Persentase Pertumbuhan	Persen	2	7	350	

Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekonomi Kreatif	
Rata-rata		182,07

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja “*Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*” tahun 2023 sebesar 72 nilai dan realisasinya 80,30 nilai atau capaian kinerja sebesar 111,53 % (*Sumber data LHE 2023*). Hasil penilaian tersebut mengindikasikan bahwa Capaian Kinerja pada indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah telah memenuhi target nilai LKjIP yang ingin dicapai. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara masih perlu melakukan peningkatan dan perbaikan dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance, termasuk penerapan fungsi manajemen secara benar, salah satunya adalah pelaporan sebagai alat evaluasi internal untuk memperbaiki kinerja yang berkesinambungan, meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja diantaranya evaluasi dan reviu dokumen perencanaan kinerja (RENSTRA, IKU dan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi), penyusunan cascading kinerja dari level Esselon II sampai dengan level eselon IV termasuk distribusi target kerjanya.

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja “*Jumlah Kunjungan Wisatawan*” tahun 2023 sebesar 1.808.979 orang dan realisasinya 1.531.974 orang atau capaian kinerja sebesar 84,69 % (*Sumber data E-Pantau 2023*). Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan variabel penting bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara karena menjadi tolok ukur kinerja. Pengembangan destinasi wisata menjadi unsur penting untuk menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Kunci pengembangan destinasi terletak pada “Atraksi (Attraction), Aksesibilitas (accessibility), dan Amenitas (amenity)”. Attraction atau atraksi adalah produk utama sebuah destinasi yang berkaitan dengan "what to see" dan "what to do". "Apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di destinasi tersebut. Atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan, harus unik dan berbeda,". Sementara accessibility atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan rambu-rambu penunjuk jalan. Sedangkan

amenity atau amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, rest area, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi. Tidak semua amenitas harus berdekatan dan berada di daerah utama destinasi. Destinasi alam dan peninggalan bersejarah sebaiknya agak berjauhan dari amenitas yang bersifat komersial, seperti hotel, restoran, dan rest area. Aspek yang juga perlu untuk ditambahkan yakni ancillary yang berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengurus destinasi tersebut. Faktor itu menjadi penting karena walaupun destinasi sudah mempunyai atraksi, aksesibilitas dan amenitas yang baik, tapi jika tidak ada yang mengatur dan mengurus hingga melestarikan maka keberlanjutan suatu destinasi bisa terancam. Selain hal tersebut di atas yang tidak kalah pentingnya adalah pemasaran pariwisata yang dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menarik minat dari calon wisatawan ataupun wisatawan repeater untuk datang ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelaksanaan promosi pariwisata adalah salah satu cara efektif dalam mendatangkan serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kab. Kutai Kartanegara.

3) Indikator Kinerja ke-3

Target kinerja “*Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif*” tahun 2023 sebesar 2 persen dan realisasinya 7 persen atau capaian kinerja sebesar 350 % (Sumber data E-Pantau 2023). Usaha ekonomi kreatif merupakan sebuah usaha yang berasal dari perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran meningkatkan perekonomian secara global. Industri kreatif erat hubungannya dengan tingkat kreativitas manusia sebagai sumber daya utama penggerak roda perekonomian. Untuk mendukung kreatifitas para pelaku ekonomi kreatif, Pemerintah pusat telah mengesahkan Undangundang Nomor 24 tentang Ekonomi Kreatif dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015, produk-produk ekonomi kreatif diklasifikasikan kedalam 16 subsektor. Rincian keenam belas subsektor ekonomi kreatif tersebut adalah sebagai berikut: Arsitektur, Desain Interior, Desain

Produk, Desain Komunikasi Visual, Film, Animasi, dan Video, Fotografi, Kriya Kuliner, Fesyen , Aplikasi dan Game Developer , Penerbitan , Periklanan ,Televisi dan Radio, Seni Pertunjukan, Seni Rupa. Pada tahun 2023 telah dilakukan pendataan jumlah usaha ekonomi kreatif yang terdiri dari 16 subsektor tersebut diatas.

pada tahun sebelumnya terdapat Indikator kinerja “Long Of Stay” (LOS) setelah dibahas dan ditetapkan bahwa indikator dimaksud di hapuskan karena dalam mencari perhitungannya terdapat kesulitan dalam menyajikan data.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 182,07 % Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 98,29 % Terjadi peningkatan/~~penurunan~~ kinerja sebesar + 83,78 %. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	70	78.25	111.79	72	80,3	111,53	Meningkat Menurun Tetap
Meningkatnya kunjungan wisata di Kutai Kartanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.600.688	1.401.866	65.08	1.808.979	1.531.974	84.69	
Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	2	2.36	118	2	7	350	
Nilai Rata – Rata					98,29			182,07	

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pariwisata sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75	80,3	107,07
Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.610.170	1.531.974	58,69
Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	5	7	140

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pariwisata tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	111,53	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	94,47	7,68	

Meningkatnya kunjungan wisata di Kutai Kartanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan	84,69	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	96,58	4,84
			Program Pemasaran Pariwisata	99,29	7,23
Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	350	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	97,91	1,85
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	97,1	9,34

Dari tabel 3.21. diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari 24 (Dua puluh empat) Sub kegiatan penunjang dengan indikator program adalah cakupan layanan administrasi perkantoran dengan target 100 % sehingga diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 94,47 %, sedangkan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.551.663.684,- mempunyai realisasi anggaran Rp. 31.695.235.143,- atau persentase serapan anggaran 94,47 %. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara telah cukup berhasil memenuhi target kinerja program walaupun belum berhasil menyerap anggaran sebesar 100%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahan volume target.
2. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**, terdiri dari 6 (Enam) kegiatan penunjang dengan persentase capaian kinerja 96,58 %, sedangkan alokasi anggaran sebesar Rp.27.836.271.000,- mempunyai realisasi anggaran Rp. 26.885.277.352,- Hasil ini menunjukkan bahwa program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata belum berhasil memenuhi target kinerja program.
3. **Program Pemasaran Pariwisata**, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dari jumlah rata-rata persentase dari realisasi program ini diperoleh capaian kinerja 99,29 %. Adapun target anggaran sebesar Rp. 26.285.800.000,- terealisasi sebesar Rp.

26.099.681.403,- Dari capaian tersebut berarti bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata telah berhasil dan berjalan dengan lancar.

4. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan penunjang dengan persentase capaian kinerja 97,91 %, sedangkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.571.987.000,- mempunyai realisasi anggaran Rp. 3,497.452.967,- Hasil ini menunjukkan bahwa program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berjalan dengan lancar.
5. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**, terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan penunjang dengan persentase capaian kinerja 97,15 %, sedangkan alokasi anggaran sebesar Rp. 14,712,500,000,- mempunyai realisasi anggaran Rp. 14,292,689,669,- Hasil ini menunjukkan bahwa program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif berjalan dengan lancar.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Program Program Pemasaran Pariwisata

- A. *Pelaksanaan Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri* dengan Anggaran : Rp. 9.565.000.000,-
Capaian Anggaran : 97,6 % Capaian Kinerja : 8 dokumen laporan Capaian Fisik : 100%

Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri adalah sebagai berikut :

a. Pameran-pameran baik di dalam maupun di Luar Daerah

Pameran-pameran dalam daerah dilaksanakan di Kecamatan Sanga-sanga (Event Merah Putih Sangasanga), dan Kecamatan Tenggarong (TIFAF) dan Hari

Kesatuan Gerak (HKG) PKK, Festival Kota Raja. Untuk Pameran Luar Daerah dilaksanakan di TMII Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan Pekalongan.



Hari Kesatuan Gerak PKK



Pameran di Semarang



Pameran Batik di Pekalongan



Pameran Kukar Festival Budaya Nusantara di Tenggarong



Pameran di Jakarta



Eroh Bebaya di Yogyakarta

b. Pengadaan Bahan Cetak Promosi Pariwisata

Bahan Cetak Promosi Pariwisata dalam Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri diantaranya adalah:

- 1) Cetak Digital Printing Indoor dan Outdoor berupa Baliho, Banner dan Backdrop sebagai bahan cetak kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata Tahun 2023.
- 2) Pengadaan Cetak Kalender Tahun 2024
- 3) Pengadaan Buku Cetak Promosi Pariwisata
- 4) Pengadaan Buku Agenda Pariwisata

c. Pengadaan Souvenir Promosi Pariwisata

Pengadaan Souvenir / Cenderamata dalam Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri diantaranya adalah:

- 1) Baju Kaos Promosi (Jaket, Celana, Baju Kaos, Sepatu)
- 2) Rompi
- 3) Cenderamata khas daerah berupa Patung Mini Lembu Swana,
- 4) Merchandise berupa Tumbler Air Dingin/Panas,
- 5) Goody Bag
- 6) Syal Ulap Doyo dan
- 7) Trophy



d. Dialog Wisata dan Sosialisasi Kepariwisata

Kegiatan Dialog Wisata, Sosialisasi Kepariwisata dan Branding Kukar Asia Wonders yang dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah atas di Kecamatan Sangasanga, Kota Bangun, Kembang Janggut dan Tabang.

e. Pembuatan Video Promosi Pariwisata

Kegiatan Pembuatan Video Promosi Pariwisata Kerjasama dengan Youtuber atas nama Asrinda Basri dilaksanakan di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Tenggara, Tenggara Seberang, Kota Bangun, Kembang Janggut, Tabang dan Kecamatan Sangasanga. Jumlah video yang dibuat adalah 12 Video dan semuanya di upload ke Akun Youtube milik Asrinda Basri dan akun resmi Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara.

Pembuatan Video Promosi untuk 20 Paket Video Promosi yang merupakan video destinasi dan event wisata yang ada di Kutai Kartanegara.

f. Kerjasama Promosi Publikasi dengan Media Online

Kerjasama Publikasi Media Online dengan 9 Penyedia Jasa Publikasi Media Online terkait pemberitaan atau iklan mengenai kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara

g. Pengadaan Pakaian Adat bagi 19 Desa di Tabang

Kegiatan pengadaan pakaian adat penari dayak dan pakaian adat miskat yang merupakan belanja barang yan diserahkan kepada masyarakat dan diperuntukkan bagi 19 Desa yang ada di Kecamatan Tabang



h. Festival Pelajar Kota Raja

Kegiatan Festival Pelajar dilaksanakan di SMPN 1 Tenggarong, diikuti oleh beberapa sekolah yang ada di Tenggarong dengan berbagai rangkai kegiatan dan dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari



i. Sosialisasi Film Perisai Mahakam

Kegiatan Sosialisasi Film Perisai Mahakam 2 merupakan tindak lanjut dari telah selesainya pembuatan film Perisai Mahakam 2 sehingga kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan untuk mempromosikan dan memperkenalkan film tersebut ke kalangan pelajar khususnya dan masyarakat pada umumnya.

1. Capaian Kinerja

a. Ruang Lingkup Wilayah.

Ruang lingkup wilayah kegiatan ini adalah meliputi Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Kota Bangun, Kembang Janggut, Tabang dan Sangasanga.

▪ b. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan atau kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri ini adalah meliputi :

1. Pameran dan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
 - a) Pameran Merah Putih Sangasanga
 - b) Pameran dalam rangka TIFAF
 - c) Pameran dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK
 - d) Pameran dalam rangka Festival Kota Raja
 - e) Pameran di TMII Jakarta
 - f) Eroh Bebaya di Yogyakarta
 - g) Pekan Batik Pekalongan
 - h) Pameran di Semarang
 - i) Tourism Road show to Bali di Propinsi Bali
2. Dialog Wisata Sosialisasi Kepariwisataaan dan City Branding Kukar Asia Wonders di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Sanga-sanga, Kecamatan Kota Bangun, Kembang Janggut dan Tabang
3. Pembuatan Video Promosi Pariwisata dengan Youtuber dan Pembuatan Video Profil Promosi Pariwisata di 20 Kecamatan Kukar
4. Pengadaan Souvenir Promosi Pariwisata
5. Pengadaan Barang Cetakan Promosi Pariwisata (Brosur, Map, Kalender dan Peta), Buku Pariwisata.

6. Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa Pakaian Adat Dayak dan Miskat kepada 19 Desa di Kecamatan Tabang
7. Kerjasama publikasi media cetak online dengan 9 penyedia jasa media online.
8. Festival Pelajar se Kota Raja di SMPN 1 Tenggarong.
9. Sosialisasi Film Perisai Mahakam di Kecamatan Muara Muntai dan Kecamatan Tenggarong.
10. Festival Dalam Rangka HUT Desa Umaq Dian dan Festibal Budaya Kecamatan Tabang

c. Output

1. Pameran dan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

a) Pameran Merah Putih Sangasanga

Merah Putih Expo dilaksanakan Tanggal 24 Januari s/d 2 Februari 2023 di Kecamatan Sangasanga. Pameran tahun ini Dinas Pariwisata menyajikan informasi mengenai daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu wisata alam Bukit Bengkirai, Batu Dinding, Wisata Pantai yang ada di Samboja, Wisata Rekreasi seperti Pulau Kumala, Ladaya dan Waduk Panji Sukarame serta Wisata Budaya yaitu Ngulur Naga, Mecaq Undat dan Nutuq Behapm di Desa Kedang Ipil.



Pameran Merah Putih Sangasanga

b) Pameran dalam rangka TIFAF 2023

TIFAF Expo dan Bazar dalam rangka Tenggarong International Folk Arts Festival (TIFAF) 2023 dilaksanakan di Halaman Stadion Rondong Demang Tenggarong. TIFAF berlangsung Tanggal 21 Juli s/d 25 Juli 2022.

- c) Dialog Wisata Sosialisasi Kepariwisataaan dan City Branding Kukar Asia Wonders.

Kegiatan dialog wisata sosialisasi kepariwisataaan dan city branding Kukar Asia Wonders dilaksanakan di 3 Kecamatan yakni di Kecamatan Sangasanga, Kecamatan Tenggarong Seberang dan Kecamatan Samboja. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah ke atas untuk memperkenalkan kepariwisataaan Kutai Kartanegara secara umum serta mensosialisasikan branding pariwisata Kutai Kartanegara yakni Kukar Asia Wonders.

- d) Pembuatan Video Promosi Pariwisata dengan Youtuber

Kegiatan Pembuatan Video Promosi Pariwisata dengan Youtuber yaitu Asrinda Basri yang memiliki ratusan ribu followers di Akun Youtube nya, serta merupakan Youtuber yang berasal dari Kutai Kartanegara. Kegiatan pembuatan video dilaksanakan di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Tenggarong, Kota Bangun, Muara Badak, Samboja, Muara Jawa dan Anggana.



Pembuatan Video Profil Promosi Pariwisata Kerjasama dengan Youtuber



Pembuatan Video Profil Promosi Pariwisata Kerjasama dengan Youtuber

e) Pengadaan Barang Cetak Promosi Pariwisata

Barang Cetak Promosi Pariwisata tahun ini berupa Brosur, Map, Kalender, Map, Buku Pariwisata serta pengadaan Souvenir berupa Patung Lembu Swana dan Plakat.

f) Sosialisasi Film Perisai Mahakam II

Film Perisai Mahakam II merupakan kelanjutan dari Film Perisai Mahakam I yang sudah selesai dibuat pada tahun 2021. Kelanjutannya yaitu Part 2, produksi pembuatannya dilaksanakan di Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Muara Wis dan Kecamatan Muara kaman. Sebelum produksi film dilaksanakan, diadakan Workshop yang berlangsung selama 4 di hari Gedung Serba Guna Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan Sosialisasi Film Perisai Mahakam 2 dilaksanakan di Kecamatan Muara Muntai dan di SMAN 1 Tenggarong



Sosialisasi Film Perisai Mahakam di SMAN 1 Tenggarong



Sosialisasi Film Perisai Mahakam di Kecamatan Muara Muntai



Sosialisasi Film Perisai Mahakam di Kecamatan Muara Muntai

2. Realisasi Anggaran

Realisasi Kegiatan dan Keuangan Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri Tahun 2023, Kabupaten Kutai Kartanegara ini menggunakan APBD dan APBDP Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023, sebesar Rp. 9.565.000.000,- (*Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*), dengan realisasi sebesar Rp. 9.017.680.728,- dan dengan sisa anggaran sebesar Rp. 47.980.660,- dan Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel berikut ini :

3. Permasalahan dan Pemecahan Masalah

Permasalahan dalam melaksanakan kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri adalah karena kegiatan sebagian besar dilaksanakan di trimester 3 dan 4 sehingga kegiatan menjadi padat dan terburu-buru.

Upaya untuk mengantisipasi hal tersebut maka dilakukan kordinasi ke semua pihak agar kegiatan - kegiatan yang ada bisa berjalan lancar dan mendapat hasil yang maksimal. Terutama kordinasi kepada yang pihak-pihak yang berkaitan dengan setiap kegiatan.

A. Saran – saran

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Salah Satu Daerah Tujuan Wisata di Kalimantan Timur. Hal ini perlu mendapat perhatian bagi Dinas/Instansi terkait mengingat Pariwisata dapat memberikan Kontribusi yang besar bagi daerah dan Masyarakat.

Untuk Pelaksanaan yang akan datang agar lebih baik perlu :

1. Promosi yang efektif dan efisien harus terus dilakukan untuk memperkenalkan berbagai jenis aneka Atraksi Wisata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pembinaan dan kerjasama dengan mitra-mitra Pariwisata harus secara kontinyu dilaksanakan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta secara aktif dalam pengelolaan Pariwisata.
4. Perlu Adanya Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait terutama hal penganggaran untuk pendukung Kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota.
5. Perlu adanya Kerjasama dengan Komunitas dalam mempublikasikan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

FOTO - FOTO KEGIATAN

1. Festival dalam rangka HUT Desa Umaq Dian yang ke 113 Tahun

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	Festival dalam rangka HUT Desa Umaq Dian	  



2. Festival Budaya Kecamatan Tabang

NO

KEGIATAN

DOKUMENTASI

1

Festival Budaya Kecamatan Tabang





B. Pelaksanaan Penyediaan data dan penyebaran Informasi pariwisata kabupaten/Kota, baik Dalam dan Luar Negeri.

Dengan Anggaran Rp. 250.000.000,- dan capaian realisasi Rp. 214.179.263,- persentase 85,67 %.

C. Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, Dengan anggaran sebesar Rp. 15.265.800.000,- tercapai serapan dengan realisasi Rp. 15.204.483.470,- dengan persentase 99,60%.

D. Pelaksanaan Peningkatan Kerja sama dan kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, dengan anggaran sebesar Rp. 1.205.000.000,- tercapai serapan realisasi Rp. 1.163.999.282,- dengan persentase 96,60%.

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Pelaksanaan Kegiatan Program Peningkatan daya Tarik Destinasi pariwisata tahun 2023 dengan anggaran alokasi Rp. 27.836.271.000,- dengan capain realisasi anggaran 26.885.277.352,- dengan persentase 96,58 %. Dengan jumlah 3 kegiatan dan 6 Sub kegiatan, adapun sub kegiatan itu adalah :

- A. ***Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*** dengan anggaran Rp. 1.150.000.000,- dan capaian realisasi Rp. 1.032.273.343,- dengan persentase 89,75 %.
- B. ***Pengadaan/pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten /Kota*** dengan anggaran Rp.5.185.000.000,- dengan capaian realisasi Rp. 4.925.613.128,- dengan persentase 95 %.
- C. ***Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*** dengan anggaran Rp. 1.865.271.000,- dengan capaian realisasi Rp. 1.796.166.800,- dengan persentase 96,45 %
- D. ***Penerapan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten /Kota*** dengan alokasi anggaran Rp. 18.706.000.000,- dengan realisasi Rp. 18.282.322.099,- dengan persentase 97,09 %.
- E. ***Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota,*** dengan alokasi anggaran Rp. 250.000.000,- dengan realisasi Rp. 225.739.620,-, dan persentase 90,30 %.

F. **Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata**, dengan alokasi anggaran Rp. 680.000.000,-, dengan capaian realisasi Rp. 620.362.362,-, dengan persentase 91,23%. Adapun Kegiatan Yang Dilaksanakan :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata

Secara umum kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata adalah suatu kegiatan yang bergerak dibidang Usaha jasa dan sarana pariwisata yaitu dengan mengadakan sosialisasi dalam mengembangkan dan membina Pelaku Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata yang berkenaan dengan pengurusan ijin usaha pariwisata, ketaatan terhadap perpajakan, kebersihan tempat usaha dan lainnya agar supaya usaha pariwisata yang dikelola bisa berkembang dengan baik.

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PARIWISATA DI KECAMATAN TABANG



KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PARIWISTA DI KECAMATAN LOA JANAN



KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PARIWISTA DI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG



2. Kegiatan Anugerah Tempat Wisata Idaman (ATWI)

Dalam rangka memberikan apresiasi penghargaan kepada pengelola destinasi yang berprestasi dalam pengelolaan tertib pajak, aturan, kebersihan, jumlah kunjungan serta pengembangan destinasi baru, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara melalui sub kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata akan melaksanakan Kegiatan Anugerah Tempat Wisata Idaman (ATWI) 2023 yang akan diikuti oleh peserta dari pengelola destinasi yang ada baik itu yang dikelola oleh swasta/perorangan maupun yang dikelola oleh Pokdarwis, Bumdes dan Pokmas di kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan Mendampingi Tim Dinas Provinsi Kaltim Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara ke Kecamatan Kota Bangun



Kegiatan Mendampingi Tim Dinas Provinsi Kaltim Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara ke Kecamatan Tenggarong Seberang.



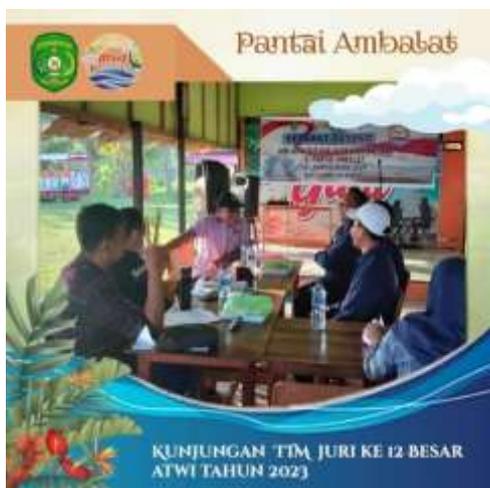
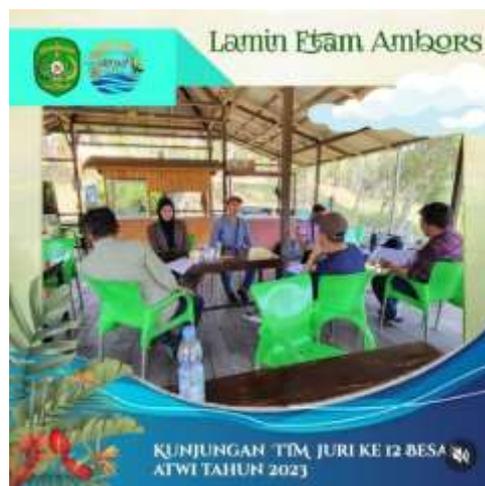
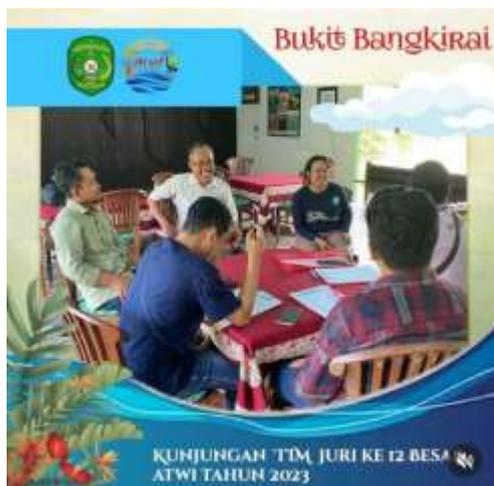
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PARIWISTA DI KECAMATAN SAMBOJA



FOTO RAPAT KEGIATAN ANUGERAH TEMPAT WISATA IDAMAN (ATWI) TAHUN 2023



KEGIATAN KUNJUNGAN TIM JURI KE 12 BESAR DTW YANG MASUK ATWI 2023 DI KECAMATAN SAMBOJA BARAT



KEGIATAN KUNJUNGAN TIM JURI KE 12 BESAR DTW YANG MASUK ATWI 2023 DI KECAMATAN SAMBOJA DAN MUARA JAWA





KEGIATAN KUNJUNGAN TIM JURI KE 12 BESAR DTW YANG MASUK ATWI 2023 DI KECAMATAN ANGGANA



KEGIATAN KUNJUNGAN TIM JURI KE 12 BESAR DTW YANG MASUK ATWI 2023 DI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG





KEGIATAN KUNJUNGAN TIM JURI KE 12 BESAR DTW YANG MASUK ATWI 2023 DI KECAMATAN LOA JANAN DAN TENGGARONG 1



3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2023 dengan Alokasi anggaran Rp. 3.571.987.000,- dengan realisasi capaian anggaran Rp. 3.497.452.967,- dengan persentase 97,91 %. Dengan jumlah 2 Kegiatan dan 4 sub kegiatan, Adapun sub kegiatan tersebut adalah :

- A. ***Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif*** dengan anggaran Rp. 1.921.987.000,- dengan capaian realisasi Rp. 1.914.352.513,- dengan persentase 99,60 %.

Adapun Kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Tahun Anggaran 2023 meliputi :

- a. Rehabilitasi Ruang Kreatif Kecamatan Anggana;



- b. Rehabilitasi Ruang Kreatif Kecamatan Muara Kaman;



- c. Rehabilitasi Ruang Kreatif Kecamatan Loa Janan;



- d. Rehabilitasi Ruang Kreatif Kecamatan Samboja Barat;



- e. Rehabilitasi Ruang Kreatif Kecamatan Marangkayu;



- f. Rehabilitasi Ruang Kreatif Kecamatan Samboja;



- g. Rehabilitasi Ruang Kreatif Kecamatan Sebulu;



h. Rehabilitasi Ruang Kreatif Kecamatan Tenggarong Seberang:



i. Revitalisasi Landscape Gedung KEKRAF Kabupaten.



- B. ***Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan*** dengan anggaran Rp. 1.450.000.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 1.411.335.454,- dengan persentase 97,33 %.

- C. ***Fasilitasi Kekayaan Intelektual*** Rp. 50.000.000,- dengan capaian realisasi Rp. 43.723.000,- dengan persentase 87,45 %.

- D. ***Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif*** Rp 150.000.000,- dengan capaian realisasi Rp. 128.042.000,- dengan persentase 85,36 %.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023 dengan alokasi anggaran Rp. 14.712.500.000,- dengan capaian realisasi Rp. 14.292.689.669,- dengan persentase 97,1 %. Dengan 2 Kegiatan dan 6 sub kegiatan, Adapun sub kegiatan adalah :

- A. ***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata***, dengan anggaran Rp. 100.000.000,- dengan capaian realisasi Rp. 81.654.547,- dengan persentase 81,65 %.

- B. ***Pelatihan Dasar SDm Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)***, dengan anggaran Rp. 100.000.000,- , dengan capaian realisasi anggaran Rp. 81.738.200,-, dengan persentase 81,74 %.

- C. ***Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata***, dengan anggaran Rp. 130.000.000,- dengan capaian realisasi Rp. 129.824.560,- , dengan persentase 99,87 %.

- D. ***Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif***, dengan anggaran Rp. 12.485.500.000,-, dengan capaian realisasi Rp. 12.209.860,978,- dengan persentase 97,79 %.

- E. ***Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif***, dengan anggaran Rp. 1.797.000.000,- dengan capaian realisasi Rp. 1.707.894.376,-, dengan persentase 95,04 %. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. **Pelaksanaan Pekan Kreatif Daerah Kecamatan Tabang**

Kegiatan dilaksanakan selama 5 hari tanggal 2 s/d 6 Mei 2023 di Lapangan Sepak Bola Desa Tukung Ritan Kecamatan Tabang. Tujuan Kegiatan ini merupakan salah satu Program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kukar Kreatif Idaman yang mana kegiatan ini lebih memprioritaskan Pelaku Usaha Kreatif dalam memasarkan Produk – Produk olahan dan ajang bagi para Pengiat Seni yang ada di Kecamatan Tabang.



- b. **Pelaksanaan Pekan Kreatif Daerah Kecamatan Tenggara Seberang**
 Kegiatan dilaksanakan selama 5 hari tanggal 23 s/d 27 Mei 2023 di Lapangan Garuda Desa Bangun Rejo L3 Kecamatan Tenggara Seberang. Tujuan Kegiatan ini merupakan salah satu Program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kukar Kreatif Idaman yang mana kegiatan ini lebih memprioritaskan Pelaku Usaha Kreatif dalam memasarkan Produk – Produk olahan dan ajang bagi para Pngiat Seni yang ada di Kecamatan Tenggara Seberang.



- c. **Pelaksanaan Pengukuhan KEKRAF dan Pekan Kreatif Daerah Kecamatan Marangkayu**
 Kegiatan dilaksanakan selama 6 hari tanggal 29 Agustus s/d 3 September 2023 di halaman Pasar Rakyat Marangkayu Kecamatan Marangkayu. Tujuan Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Kecamatan Marangkayu yaitu sebagai perpanjangan tangan dari Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten dalam penyampaian informasi yang ada di Kabupaten dan Pengembangan Pelaku ekonomi kreatif yang ada di kecamatan dan Pelaksanaan Pekan Kreatif Daerah Kecamatan Marangkayu dimana Tujuan Kegiatan ini merupakan salah satu Program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kukar Kreatif Idaman yang mana kegiatan ini lebih memprioritaskan Pelaku Usaha Kreatif dalam memasarkan Produk – Produk olahan dan ajang bagi para Pngiat Seni yang ada di Kecamatan Marangkayu.

d. **Pelaksanaan Workshop Manajemen Event**

Kegiatan Workshop Manajemen Event dilaksanakan selama 3 hari tanggal 10 s/d 12 November 2023 di Hotel Lesong Batu yang diikuti oleh pelajar dan Pelaku Event Serta Perwakilan Komite Ekonomi Kreatif Kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara, dimana Workshop ini bertujuan untuk berbagi ilmu mengenai Cara Memanajemen Sebuah Event yang Baik demi membangkitkan perkembangan potensi serta industri kreatif pada insan muda di Kabupaten Kutai kartanegara.



e. **Pelaksanaan Pengukuhan KEKRAF Kecamatan Muara Kaman, Anggana dan Samboja Barat**

Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari tanggal 24 November 2023 di Taman Kota Raja Kecamatan Tenggarong. Tujuan Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Kecamatan Muara Kaman, Anggana dan Samboja Barat yaitu sebagai perpanjangan tangan dari Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten dalam penyampaian informasi yang ada di Kabupaten dan Pengembangan Pelaku ekonomi kreatif yang ada di kecamatan.

f. **Pelaksanaan Pekan Kreatif Daerah Kecamatan Tenggarong**

Kegiatan dilaksanakan selama 5 hari tanggal 4 s/d 8 Desember 2023 di Halaman Parkir Kantor Bupati Kab. Kutai Kartanegara Kecamatan Tenggarong. Kegiatan ini merupakan salah satu Program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kukar Kreatif Idaman yang mana kegiatan ini lebih memprioritaskan Pelaku Usaha Kreatif dalam memasarkan Produk – Produk olahan dan ajang bagi para Pengiat Seni yang ada di Kecamatan Tenggarong.

- F. *Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*, dengan anggaran Rp. 100.000.000,-, dengan capaian realisasi Rp. 98.950.100,-, dengan persentase 98,95 %.



Workshop Sub sektor Film



5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 dengan anggaran Rp. 33.551.663.684,- dengan capaian realisasi Rp. 31.695.235.143,- , dengan persentase 94,47 %.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat daerah	72	Nilai	80.30	111,53
Meningkatnya kunjungan wisata di Kutai Kartanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase DTW yang memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	64	Persen	65	101,56
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Okupansi	26	Persen	62	238.46
Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terfasilitasi	4	Persen	4	100
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Ekraf	7	persen	7	100

Tabel 3.6
Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Alternatif solusi dan tindak lanjut
factor Penghambat Capaian Program

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Alternatif solusi dan tindak lanjut faktor Penghambat
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat daerah	Tersedianya pagu anggaran, mempermudah dan fasilitasi pengiriman data hotel dengan email, whatshapp dan SMS	Belum semua hotel isi form data dan kirim laporan
Meningkatnya kunjungan wisata di Kutai Kartanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase DTW yang memenuhi Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi	Tersedianya anggaran	belum ada faktor penghambat yang signifikan
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Okupansi	Tersedianya data capaian kinerja kegiatan	Ketidaksinkronan data yang dilaporkan
Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terfasilitasi	Tersedianya anggaran peningkatan daya tarik wisata	Status kepemilikan lahan memerlukan mekanisme hibah
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Ekraf	Tersedianya anggaran	Belum terbentuknya Komite Ekonomi Kreatif di 18 Kecamatan

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 96,72 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2023

Sedangkan pada tahun 2023 realisasi anggaran sebesar 96,72 % dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	798.700.000	785.924.573	98,40%	12.775.427,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	157.500.000	118.140.222	75,01%	39.359.778,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	457.500.000	369.658.734	80,80%	87.841.266,00
Meningkatnya kunjungan wisata di Kutai Kartanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.018.018.218	13.376.353.000	95,42%	641.665.218,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	394.920.000	327.182.185	82,85%	67.737.815,00
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (Long Of Stay)				
Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif	Jumlah Aktifitas Ekonomi Kreatif	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	195.660.000	156.823.879	80,15%	38.836.121,00
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	56.240.000	55.790.968	99,20%	449.032,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	607.500.000	569.891.557	93,81%	37.608.443,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.454.226.150	4.411.341.698	99,04%	42.884.452,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	565.170.000	563.776.000	99,75%	1.394.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	157.500.000	156.188.500	99,17%	1.311.500,00
Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	492.400.000	432.524.132	87,84%	59.875.868,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120.000.000	116.758.000	97,30%	3.242.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.694.570.000	2.652.243.402	98,43%	42.326.598,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	60.690.000	56.748.000	93,50%	3.942.000,00
Pengadaan Mebel	1.129.895.000	1.126.574.409	99,71%	3.320.591,00
Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	3.500.000.000	3.289.197.331	93,98%	210.802.669,00
Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	117.000.000	116.590.647	99,65%	409.353,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.139.118.180	733.122.433	64,36%	405.995.747,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.646.386.136	1.534.322.063	93,19%	112.064.073,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	367.600.000	354.545.863	96,45%	13.054.137,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.520.000	36.886.000	56,30%	28.634.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.550.000	179.110.000	99,75%	440.000,00
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176.000.000	175.541.547	99,74%	458.453,00
Perencanaan Kawasan Strategius Pariwisata Kabupaten/Kota	1.150.000.000	1.032.273.343	89,76%	117.726.657,00
Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.185.000.000	4.925.613.128	95,00%	259.386.872,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.865.271.000	1.798.966.800	96,45%	66.304.200,00
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	18.706.000.000	18.282.322.099	97,74%	423.677.901,00
Penyediaan layanan pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota	250.000.000	225.739.620	90,30%	24.260.380,00
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	680.000.000	620.362.362	91,23%	59.637.638,00
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	9.565.000.000	9.517.019.388	99,50%	47.980.612,00

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran dan Baik dalam Negeri Kabupaten/Kota	Kegiatan Pariwisata dan Luar Negeri Pariwisata	15.265.800.000	15.204.483.470	99,60%	61.316.530,00
Penyediaan Data dan Penyeban Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		250.000.000	214.179.263	85,67%	35.820.737,00
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		1.205.000.000	1.163.999.282	96,60%	41.000.718,00
Pengembangan dan revitalisasi Prasarana Kota Kreatif		1.921.987.000	1.914.352.513	99,60%	7.634.487,00
Fasilitasi Pendanaan dan pembiayaan		1.450.000.000	1.411.335.454	97,33%	38.664.546,00
Fasilitasi Intelektual	Kekayaan	50.000.000	43.723.000	87,45%	6.277.000,00
Penyusunan Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rencana Pengembangan	150.000.000	128.042.000	85,36%	21.958.000,00
Pelaksanaan Masyarakat Pengembangan Pariwisata	Peran serta dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	100.000.000	81.654.547	81,65%	18.345.453,00
Pelatihan Dasar Kepariwisataa Masyarakat, Guru, dan pelajar (mahasiswa dan/atau Siswa)	SDM bagi (mahasiswa dan/atau Siswa)	100.000.000	81.738.200	81,74%	18.261.800,00
Seertifikasi bagi Tenaga kerja Pariwisata	Kompentensi Bidang Pariwisata	130.000.000	129.824.560	99,87%	175.440,00
Fasilitasi Produksi, Konsumsi dan Ekonomi Kreatif	Proses Kreasi, Distribusi dan Konservasi	12.485.500.000	12.209.860.978	97,79%	275.639.022,00

	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1.797.000.000	1.707.894.376	95,04%	89.105.624,00
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100.000.000	98.950.100	98,95%	1.049.900,00
Total					
		105.958.221.684	102.487.569.626	96,72%	3.470.652.058,00

Tabel 3. 8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2022)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	192.521.407,00	172.537.500,00	89,61	19.983.907,00
Meningkatnya kunjungan wisata di Kutai Kartanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.539.000,00	46.915.000,00	89,30	5.624.000,00
	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (Long Of Stay)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	236.434.400,00	236.266.400,00	99,93	168.000,00
Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif	Jumlah Aktifitas Ekonomi Kreatif	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.939.183.080,00	13.013.545.269,00	87,11	1.925.637.811,00
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.238.522.728,00	3.211.930.578,00	99,17	26.592.150,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	339.210.000,00	243.140.000,00	71,67	96.070.000,00
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	141.382.000,00	135.359.000,00	95,73	6.023.000,00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	70.660.000,00	68.460.000,00	96,88	2.200.000,00
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40.821.000,00	38.821.000,00	95,10	2.000.000,00

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	86.012.500,00	84.822.500,00	98,62	1.190.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	577.429.013,00	565.304.900,00	97,90	12.124.113,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147.340.000,00	142.083.500,00	96,43	5.256.500,00
	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	87.695.500,00	87,70	12.304.500,00
	Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	266.719.400,00	266.322.468,00	99,85	396.932,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	107.582.800,00	107.370.000,00	99,80	212.800,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	622.894.470,00	435.883.911,00	69,98	187.010.559,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	1.689.545.408,00	1.598.371.768,00	94,60	91.173.640,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Jabatan	250.370.000,00	226.819.080,00	90,59	23.550.920,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.120.000,00	17.480.000,00	66,92	8.640.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.740.000,00	121.700.000,00	99,97	40.000,00
	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Kabupaten/Kota	150.000.000,00	108.202.000,00	72,13	41.798.000,00
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.279.491.904,00	3.208.420.979,00	97,83	71.070.925,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	79.591.300,00	77.943.300,00	97,93	1.648.000,00
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000,00	0	0	300.000.000,00

Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.099.999.805,00	1.018.900.388,00	92,63	81.099.417,00
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	72.850.200,00	72.329.200,00	99,28	521.000,00
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.140.000.000,00	1.135.776.162,00	99,63	4.223.838,00
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam Negeri dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	398.862.180,00	361.554.364,00	90,64	37.307.816,00
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	165.272.618,00	85.460.000,00	51,70	79.812.618,00
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	639.183.000,00	637.367.441,00	99,71	1.815.559,00
Penyediaan Infrastruktur	228.630.000,00	228.171.000,00	99,80	459.000,00
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1.088.452.900,00	1.033.818.400,00	94,98	54.634.500,00
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	282.060.100,00	280.058.096,00	99,96	2.002.004,00
Total	32.171.421.213,00	29.068.829.704,00	99,29	3.102.591.509,00

Dengan demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 6,65 %.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 rata-rata sebesar 182,07 % (sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Capaian kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebesar 111,53 % (Sangat Tinggi).
- 2) Capaian kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 84.69 % (Tinggi).
- 3) Capaian kinerja Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif sebesar 350 % (Sangat Tinggi).

Capaian kinerja tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja Dinas Pariwisata sebesar 76.60 % atau terjadi kenaikan kinerja sebesar 105,47 %.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mendorong pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada aspek pembangunan pariwisata yang juga merupakan salah satu pilar pembangunan yang sejalan dengan Program Visi dan Misi Kukar Idaman Berdasarkan Program Visi dan Misi KUKAR IDAMAN 2021 - 2026, Misi yang Ketiga yaitu **“MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF”**.
2. Melakukan sinergitas dengan menggabungkan industry ini dalam sebuah kerangka pariwisata agar lebih memaksimalkan daya kreativitas masyarakat, komunitas dan para pelaku kreatif di Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memberikan ruang yang cukup untuk berkembangnya ide-ide kreatif masyarakat yang dieksplorasi sehingga ada temuan-temuan baru dari komunitas.

4. Diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Kota MICE {Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition} yang akan bersinergi dengan Pembangunan Ekonomi Kreatif.
5. Mampu menjadi fasilitator bagi perkembangan Komunitas Ekonomi Kreatif Daerah di Kutai Kartanegara.
6. Sebagai wadah bagi para seniman Perorangan maupun Komunitas untuk mengekspresikan Kreativitas dan karya seni budaya lokal.
7. Mengangkat dan menghidupkan kembali seni budaya bahari yang memperkaya khazanah seni budaya Kutai Kartanegara melalui Komunitas Ekonomi Kreatif.
8. Meningkatkan Presentasi Aktivitas Ekonomi Kreatif.
9. Memajukan Kreativitas Komunitas Ekonomi Kreatif Daerah melalui Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk mengenalkan Kutai Kartanegara sebagai Daerah Tujuan Wisata, serta secara berkesinambungan melakukan pembinaan dalam rangka mensukseskan kegiatan Misi Indonesia Kreatif.
10. Bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Event yang diselenggarakan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka meningkatkan peran serta dan kreatifitas di dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif di Kutai Kartanegara.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, 15 Januari 2024

Kepala Dinas,



H. SLAMET H. DIRAHARJO, S. Hut., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19700407 199803 1 013